

Dr. Hj.Ummi Maskanah,SH.,M.Hum

GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA



GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Penulis

Dr. Hj. Ummi Maskanah, S.H., M.Hum.
maskanahummi@gmail.com

Tataletak dan Perancang Sampul
Wawan Kurniawan SH

Hak Cipta :

Dr. Hj. Ummi Maskanah, S.H., M.Hum.

Diterbitkan Oleh :

Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung
(Lemlit Unpas Press)
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung
Telp. (022) 2021440
email : lembagapenelitian@unpas.ac.id

Cetakan I ,2020

14,8 x 21 cm

ISBN : 978-623-7111-45-0

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SEKAPUR SIRIH	iii
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II HUKUM ACARA PERDATA	10
1. Asas-asas Hukum Acara Perdata.....	10
a. Asas Kebabasan Hakim	10
b. Asas Terbuka dan Dibuka Untuk Umum	11
c. Asas Hakim Aktif Memimpin Sidang	12
d. Asas Tidak ada Kewajiban Untuk Mewakilkan	12
e. Asas Proses Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	13
f. Asas Putusan Harus Disertai Alasan-alasan	14
2. Para Pihak yang Berperkara	15
BAB III GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION).....	24
A. Pengertian Class Action	24
B. Sejarah dan Perkembangan Class Action	30
1. Negara Inggris	30
2. Negara Kanada	31
3. Negara Australia	33
4. Negara Amirika Serikat	39
5. Negara India	42
6. Negara Filipina	44
7. Negara Indonesia	49

BAB IV UNSUR - UNSUR DAN SYARAT - SYARAT CLASS ACTION	62
A. Unsur-Unsur Class Action di beberapa negara	62
B. Syarat-Syarat Class Action di beberapa negara	72
BAB V PROSEDUR CLASS ACTION DI BEBERAPA NEGARA	86
A. Tuntutan Hak Secara Class Action	86
B. Proses Sertifikasi atau Pemberian Ijin	90
C. Pemberitahuan	93
D. Pemeriksaan Di Pengadilan	96
E. Putusan	101
BAB VI PENERAPAN PROSEDUR CLASS ACTION DALAM PERKARA DI PENGADILAN INDONESIA	118
A. Katagori Gugatan sebelum Perma No. 1 Tahun 2002.....	122
B. Katagori Gugatan sesudah Perma No. 1 Tahun 2002.	153
BAB VII KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM KASUS PER KASUS	175
DAFTAR PUSTAKA	193
LAMPIRAN :	
- PERMA Nomer 1 Tahun 2002 Tentang Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok;	
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	
- Salinan PUTUSAN No. 134/Pdt.G./1997/PN.Jak.Sel. tentang gugatan korban pemadaman listrik. (Sebagai Contoh)	

Tentang Penulis



Dr. Hj Ummi Maskanah,SH.,MM.,M.hum, lahir di Surakarta pada tahun 1963. Menyelesaikan Programsarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada tahun 1991, melanjutkan study program pascasarjana Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta tahun 2000, lanjut study program pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 2004, kemudian menyelesaikan study program doktoral Universitas Parahyangan (UNPAR) Bandung tahun 2010. Penulis sebagai staf pengajar program kekhususan Hukum Acara di Fakultas Hukum UNPAS, baik distrata satu maupun di program pascasarjana, pernah sebagai kepala BBKH UNPAS selaku konsultan hukum, MEDIATOR (bersertifikat) dan ADVOKAT yang telah menangkan berbagai perkara publik maupun privat, sebagai TRAIENER Internasional tentang *Street Law* juga sebagai aktifis hak-hak perempuan itu semua merupakan bentuk implementasi Tridarmarguruan tinggi. Saat ini penulis menjabat sebagai Hakim *Ad-hoc* Tindak Pidana Kortpsi (Tipikor) tingkat Banding di pengadilan tinggi

Selain itu yang paling utama Dr. Hj Ummi Maskanah,SH.,MM.,M.hum., aktif sebagai penulis dan peneliti, khususnya bidang kepakaran Hukum Acara , telah dipublikasikan baik melalui jurnal ilmiah Nasional maupun jurnal ilmiah Internasional yang ter-indeks Scopus. Karya tulisnya anatara lain: Perbandingan Tentang Implementasi *E-Court* Dalam Sistem Peradilan Antara Indonesia Dengan Malaysia (dipersentasikan di Universitas Kebangsaan Malaysia); Resolving Business Disputes Through Small Claim Court To Support The Ease Of Doing Business In Indonesia (Comparison: Netherlands and Malaysia) Ter-indeks Scopus; Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai Model Penyederhanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Formal yang telah terbit menjadi buku yang berjudul “ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA” (Telaah kritis terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa); dan masih banyak lagi yang lainnya.

ISBN 978-623-7111-45-0

9 786237 111450